

TESIS

**GELAR AKADEMIK SEBAGAI ATRIBUT POLITIK NURDIN ABDULLAH
PADA PILGUB SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

Disusun Oleh:

**MOHAMMAD RAIHAN
E052191008**



**MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Raihan Fatar Bharda

Nomor Induk Mahasiswa : E052191008

Program Studi : (S2) Ilmu Politik

Menyatakan dengan ini bahwa tesis yang berjudul "Gelar Akademik Sebagai Atribut Politik Nurdin Abdullah Pada Pilgub Sulawesi Selatan Tahun 2018" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Agustus 2023

Yang menyatakan



Mohammad Raihan F. B

E052191008

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**GELAR AKADEMIK SEBAGAI ATRIBUT POLITIK NURDIN ABDULLAH
PADA PILGUB SULAWESI SELATAN 2018**

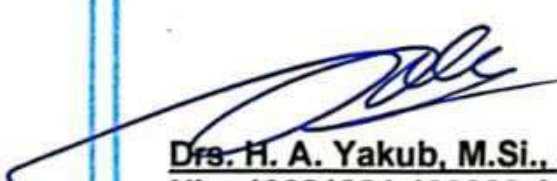
Disusun dan diajukan oleh
MOHAMMAD RAIHAN FATAR BHARDA
E052191008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **1 Agustus 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.
Nip. 19621231 199003 1 001


Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si
Nip. 19730813 199803 2 001

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,


Dr. Ariana, S.IP., M.Si.
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
Nip. 197508182008011008

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan serta dapat menyelesaikan karya ilmiah tesis ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. Bapak Fatori dan Mama Arfiah Arsyad, yang selalu memberikan dukungan disertai doa yang selalu dipanjatkan dan diucapkan dalam setiap sujudmu untuk Ananda tercinta. Terimakasih atas semua ketulusan yang engkau berikan. Buat saudara ku tercinta adinda Saskia Nabila, saya percaya doa dan sujudmu selalu menyebut namaku.

Penulis menyadari selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan tesis ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. **Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.** selaku pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
4. **Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.I.P., M.Si** selaku penasehat pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini,
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si** Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan

dengan sebaik mungkin.

6. Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak, **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si., Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D dan ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.I.P., M.Si.** atas waktu dan kesiapannya memberikan masukan kepada penulis demi kebaikan dan penyempurnaan tulisan ini.
7. Seluruh Staf khususnya Departemen Ilmu Politik, serta staf administrasi Pascasarjana di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
8. kepada teman – teman seperjuangan pasca ilmu politik unhas kak cenne, harun, Naje, fikar, yusril, hidayat, syahrir, sri, wil, nining, besse, Eko dan wardah terimakasih telah membersamai penulis selama ini dalam mengarungi Samudra Pendidikan di prodi ilmu politik unhas.
9. Kepada wanita tegas nan anggun, Uthi baramuli. Yang telah menjadi pendorong dan penyemangat dalam kehidupan penulis.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 1 juni 2023

Mohammad Raihan

ABSRTAK

Mohammad Raihan. Gelar Akademik Terhadap Citra Politik (Studi Kasus Pemanfaatan Gelar Professor Sebagai Atribut Politik Nurdin Abdullah Pada Pilgub Sulawesi Selatan Tahun 2018). (Dibimbing Oleh: Andi Yakub dan Gustiana)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pemanfaatan gelar akademik (professor) sebagai atribut politik dalam pembangunan citra positif Nurdin Abdullah pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada Pilkada Serentak 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menganalisis dan menjelaskan bagaimana Nurdin Abdullah memanfaatkan gelar akademik selama masa kampanye pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Teori dramaturgi digunakan dalam menganalisis pada konteks penelitian, yang menempatkan dan melibatkan tindakan dalam panggung depan dan panggung belakang dalam setting politik pemilihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa panggung depan pemanfaatan gelar akademik merupakan simbol yang dibangun oleh Nurdin Abdullah dalam membentuk citra diri sebagai seorang cendekiawan yang turun untuk berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Hal ini memberi sentuhan baru pada pemilihan gubernur, yang sebelumnya tidak pernah dikukan oleh kandidat lain. Setting politik pada penelitian ini jelas mengkaitkan bahwa citra professor tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya formulasi politis yang membangunya. Citra ini berkesesuaian dengan plot politik yang dibangun lewat pemberitaan atas keberhasilan Nurdin Abdullah saat memimpin kabupaten Bantaeng selama dua periode. Hal ini yang desain dengan menggunakan pendekatan politik media secara massif, sebagai upaya dalam menarik perhatian public, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang linier antara gelar akademik yang Nurdin Abdullah dengan kemampuannya dalam menjalankan roda kepemimpinan sebelumnya.

Kata Kunci: Gelar Akademik, Atribut Politik, Citra, Dramaturgi.

ABSTRACT

Mohammad Raihan. Academic Degree Against Political Image (Case Study of the Utilization of a Professor's Title as a Political Attribute for Nurdin Abdullah in the 2018 South Sulawesi Governor Election). (Supervised by: Andi Yakub and Gustiana)

This study aims to analyze and explain the use of an academic degree (professor) as a political attribute in building Nurdin Abdullah's positive image in the election of the Governor of South Sulawesi in the 2018 Simultaneous regional head elections.

This research is a qualitative research, by analyzing and explaining how Nurdin Abdullah used his academic degree during the campaign period for the election of the Governor of South Sulawesi. Dramatugri theory is used in identifying research contexts, which place and involve action on the front stage and back stage in the political setting of elections.

The results of the study show that the front stage of the use of academic degrees is a symbol built by Nurdin Abdullah in forming self-image as a scholar who comes down to contribute to the progress of society. This put a new twist on the gubernatorial election, which had never been done before by any other candidate. The political setting in this research clearly relates that the image of a professor cannot stand alone without a political formulation that builds it. This image is consistent with the political plot that was built through reporting on the success of Nurdin Abdullah when he led Bantaeng district for two periods. This is designed to use a massive media political approach, as an effort to attract public attention, so that it can be stated that there is a linear relationship between Nurdin Abdullah's academic degree and his ability to carry out the previous leadership wheel.

Keywords: Academic Degree, Political Attributes, Image, Dramaturgy.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	<i>vi</i>
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA	13
2.1 Politik Pencitraan	13
2.1.1 Pemahaman Tentang Pencitraan	13
2.1.2 Pencitraan Dalam Konteks Politik	18
2.2 Teori Interaksionalisme Simbolik	23
2.2.1 Mengenal Interaksionalisme Simbolik	23
2.2.2 Pencitraan Politik Dalam Interaksionalisme Simbolik	30
2.3 Dramaturgi Sebagai Implikasi Interaksionalisme Simbolik	31
2.3.1 Arti Penting Dramaturgi	31
2.3.2 Komponen Dramaturgi	33
2.4 Penelitian yang Relevan	37
2.5 Kerangka Pemikiran	47

BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Tipe peneltian	52
Lokasi dan Waktu Penelitian	52
3.2 Sumber Data	53
3.3 Informan Penelitian	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data	55
3.5 Teknik Analisis Data	57
 BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	 60
4.1 Nurdin Abdullah Sebagai Politisi dan Akademisi	60
4.2 Nurdin Abdullah Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018	 70
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN	 83
5.1 Hasil Penelitian	83
5.1.1 Panggung Depan: Gelar Akademik Sebagai Bentuk Interaksionalisme Simbolik.....	 84
5.1.2 Setting Politik: Kepemimpinan Transformatif Sebagai Implikasi Gelar Akademik	 102
5.2 Implikasi Teori	110
 BAB VI PENUTUP	 117
6.1 Kesimpulan	117
6.2 Saran	118
 DAFTAR PUSTAKA.....	 119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kandidat politik wajib untuk senantiasa memaksimalkan perkenalanannya dirinya kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kandidat politik dituntut agar dapat membangun sebuah citra yang positif. Citra politik umumnya berhubungan dengan rekam jejak kehidupan dan pengalaman yang telah dilalui, serta dapat pula berupa hal-hal yang menyangkut aspek pendidikan, latar belakang keluarga, profesionalitas, gaya kepemimpinannya, moralitas dan aspek-aspek lainnya.

Kandidat politik senantiasa berupaya maksimal menampilkan citra diri positif secara terencana, bertahap dan terus menerus dengan tujuan membuat orang-orang tertarik, merubah pandangan, sikap, perilaku, dukungan dan tindakannya sesuai tujuan atau target yang ditetapkan pihak yang membentuk citra politik. Sebab hal tersebut berhubungan dengan bagaimana strategi digunakan oleh politisi dalam menarik simpati masyarakat dalam sebuah kontestasi politik.

Pembentukan citra Joko Widodo merupakan salah satu bentuk nyata dari strategi pembentukan citra positif yang berhasil membangun kesan baik di mata publik. Kesan sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat, lewat berbagai citra yang sering ditampilkan oleh media massa selama menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dimana konsep blusukan merupakan hal yang paling dominan membentuk citra Joko Widodo sebagai seorang pemimpin dengan kinerja yang

merakyat dan pribadi yang sederhana. Citra tersebut kemudian banyak berkontribusi terhadap kemenangan Joko Widodo dalam kontes Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014¹. Fenemona sebaliknya terjadi pada tahun 2018. Citra Joko Widodo, seperti yang telah digambarkan di atas mulai mengalami dekonstruksi yang bertubi-tubi yang datang dari rival politik. Di mana melalui hastag #2019GantiPresiden yang berupaya menampilkan citra negatif Joko Widodo sebagai pemimpin yang tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas, dan inkonsiten terhadap janji-janji politiknya²

Betapa besarnya pengaruh citra bagi seorang kandidat, dapat ditemui pula pada kasus Hary Tanoesoedibjo. Sejak awal karirnya terjun ke dalam dunia politik, Hary Tanoesoedibjo telah banyak menggunakan stasiun televisi sebagai medium untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Sebagaimana sewaktu memasuki kontes pilpres 2014, Hary Tanoesoedibjo yang dihendak dipasangkan oleh figur Wiranto, tak henti-hentinya berupaya menampilkan citra positif sebagai sepasang pemimpin yang 'bersih, peduli, tegas' lewat stasiun televisi miliknya (Malvi, 2014). Bahkan pada kontestasi selanjutnya, setelah sukses mendirikan partai politik dan menempatkan dirinya sebagai ketua umum. Pencitraan Hary Tanoesoedibjo semakin ramai lewat iklan partai Perindo yang

¹ Desy Kurniasri, Pencitraan Presiden Jokowi di Surat Kabar (Analisis Framing terhadap pembentukan citra Presiden Jokowi di harian Koran Tempo dan Media Indonesia). (Jakarta: Jurnal Interaksi Online, 2015), Hal. 2

² Rusmulyadi & Hafiar H, Dekonstruksi Citra Politik Jokowi dalam Media Sosial. (Jurnal PProfesi Humas, Volume 3, No. 1, 2018), Hal. 5

menampilkan dirinya sebagai sosok yang merakyat. Sosok yang merangkul masyarakat ekonomi lemah demi terciptanya Indonesia yang sejahtera. Juga sosok yang sangat mengakui pluralitas yang ditandai dengan ikon, indeks dan simbol yang muncul dalam iklan yang menggambarkan keberagaman rakyat Indonesia³.

Pemberitaan media massa, iklan, dan pembangunan agenda di dunia maya merupakan medium yang telah digunakan oleh para politisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, dalam upaya memperkenalkan diri seorang politisi juga memiliki beberapa jenis pilihan dalam memperkenalkan dirinya di mata masyarakat, yakni:

- 1) Konten Serangan, yang ditujukan untuk mendiskreditkan lawan.
- 2) Konten Argumen, yang memperlihatkan kemampuan para kandidat untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi;
- 3) Konten Identitas, yang memberi pemahaman mengenai siapa sang kandidat kepada para pemilih;
- 4) Konten Resolusi, dimana para kandidat menyimpulkan pemikiran mereka untuk para pemilih⁴.

Pemanfaatan metode pemasaran di dalam bidang politik dikenal dengan istilah pemasaran politik (*political marketing*), yakni sebuah metode yang digunakan untuk membantu politikus dan partai politik untuk membangun hubungan dua arah dengan masyarakat yang menjadi

³ Arina Salsabilla, Representasi Citra Politik Harry Tanoesoedibjo Dalam Video Klip Mars Partai Perindo. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), Hal. 132

⁴ Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2011), Hal. 280

konstituennya. Citra Jokowi sebagai sosok yang merakyat, serta Hary Tanoesoedibjo sebagai sosok bersih dan menghargai keberagaman. Tak serta merta merupakan citra yang paling ideal untuk digunakan oleh para politisi untuk memenangkan pertarungan politik. Sebab hubungan yang dibangun dengan konstituen harus memperhatikan beberapa hal sesuai dengan segmentasi pemilih dan positioning yang ingin ditanamkan dalam benak pemilih. Pemanfaatan citra politik yang tepat beserta cara-caranya dapat mempengaruhi minat pemilih dan akhirnya akan mempengaruhi konstituen memutuskan memilihnya⁵.

Citra Politik yang dibangun oleh Basmin Mattayang-Syukur Bijak sebagai sosok pemimpin yang peduli dan kompeten telah berpengaruh banyak terhadap kemenangannya di Kabupaten Luwu pada Pilbub 2018 (Ma'sum, 2020). Citra tersalurkan melalui empat cara, yakni penampilan sosok apa adanya (*Pure Publicity*), pemanfaatan orang lain dalam mempopulerkan diri (*Free Ride Publicity*), pemanfaatan simpati atau apresiasi pada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa (*Tie-in Publicity*); dan pemanfaatan media massa dalam mempopulerkan diri (*Paid Publicity*). Hal ini merupakan bukti konkrit pada konteks lokal.

Peran gelar akademik sebagai citra politik dapat relevan di Indonesia, terutama dalam konteks di mana pendidikan dianggap sebagai indikator kualitas dan prestise individu. Namun, perlu dicatat bahwa citra

⁵ Endang Rini, Pemasaran Politik Dalam Mempengaruhi Keputusan Pemilih. Medan: Jurnal Ekonom Universitas Sumatera Utara, Vol 15, No 4, Oktober 2012), Hal. 4

politik yang kuat bukan hanya ditentukan oleh gelar akademik, tetapi juga oleh sejumlah faktor lainnya seperti rekam jejak, integritas, keterlibatan dalam masyarakat, dan kemampuan berkomunikasi.

Di Indonesia, penggunaan gelar akademik sebagai citra politik telah diterapkan oleh sejumlah politisi dan pejabat pemerintah. Beberapa di antaranya bahkan menekankan gelar akademik mereka sebagai bagian dari identitas politik mereka, misalnya dengan menambahkan gelar akademik di belakang nama mereka saat berbicara di depan publik atau dalam iklan kampanye politik. Namun, efektivitas pemanfaatan gelar akademik sebagai citra politik di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat literasi masyarakat, persepsi masyarakat terhadap gelar akademik tertentu, dan pemahaman tentang relevansi gelar akademik dengan pekerjaan politik yang dijalankan. Selain itu, kredibilitas citra politik yang ditunjukkan oleh pemanfaatan gelar akademik juga dapat dipertanyakan jika terdapat dugaan penipuan atau manipulasi terhadap gelar akademik yang dimiliki oleh politisi.

Nurdin Abdullah merupakan seorang politisi dan pejabat pemerintahan di Indonesia yang juga memiliki gelar akademik sebagai professor di bidang agrikultur. Pemanfaatan tagline "prof-andalan" sebagai strategi politik dapat berdampak pada citra politik yang dibangun oleh Nurdin Abdullah. Keberhasilan Nurdin Abdullah dalam memenangkan kontes Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018. Melalui citra yang dibangun sebagai pemimpin yang transformatif dan latar belakang

pendidikan sebagai sosok professor yang senantiasa dikumandangkan selama masa kampanye. Meski tak diusung oleh partai politik yang dominan, kemenangan Nurdin Abdullah juga terbilang unik karena telah berhasil mengubah kecenderungan lama yang terjadi di Sulawesi Selatan, sebuah wilayah yang identik dengan lumbung Partai Golkar. Dan keberadaan partai di wilayah ini sangat berperan krusial di berbagai kesempatan politik. Di mana pada kontes sebelumnya saja, di tahun 2013 kemenangan Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak terlepas dari posisinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan. Dimana, mayoritas (80%) dari pemilih Golkar memilih untuk memilihnya pada kontes pemilihan gubernur 2013⁶.

Citra yang dibangun oleh Nurdin Abdullah sebagai pemimpin transformatif melalui tagline 'Kerja Nyata' boleh dikatakan bukan hal baru dalam kontes perpolitikan Indonesia, kasus Joko Widodo, Basuki Tjahya Purnama (Ahok), dan Danny Pomanto di Makassar telah banyak menggunakan itu. Tetapi, pemanfaatan gelar akademik seperti 'Professor' seperti pada identitas politik Nurdin Abdullah melalui atribut pengenal 'Prof-Andalan' saat berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman (Andalan), merupakan atribut pencitraan yang terbilang cukup asing dalam kontes perpolitikan Indonesia, namun sinyalir berpengaruh dominan terhadap kemenangan seorang kontestan politik dalam situasi tertentu.

⁶ Haryanto. Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. (Makassar: jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 17, Nomor 3, Maret 2014), Hal. 7

Meski terdapat pula penelitian lain, yang menyimpulkan bahwa kinerja dan program kerja yang ditawarkan merupakan pertimbangan yang paling digunakan oleh para pemilih milenial di Kota Makassar pada Pemilihan Gubernur Sulawesi selatan tahun 2018⁷.

Masuknya variabel akademisi maupun gelar akademik dalam kontes politik Indonesia, dapat dilacak mula-mula pada era kepemimpinan Soeharto atau yang diidentik dengan istilah Orde Baru. Seorang pemimpin yang berhasil mengidentikkan dirinya sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Sebagaimana pada era ini, pembangunan di Indonesia banyak bertumpu pada kehadiran ekonom yang berasal dari universitas ternama, yang kemudian populer disebut sebagai “teknokrat”, yang mengusung visi mengantarkan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan melalui praktik industrialisasi⁸. Hal ini tentunya berpengaruh besar pada pengangkatan seorang teknokrat B.J Habibie Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kemudian terangkat sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto pada tahun 1998.

Kehadiran akademisi dalam dunia politik tentunya memiliki peran tersendiri dalam menjauhkan politik dengan praktik transaksional dan pragmatisme politik. Sebab para akademisi dianggap memiliki otoritas dan kewajiban moral untuk memberi tafsir rasional terhadap fenomena dan cita-

⁷ Dewi Sagita, Perilaku Pemilih Milenial dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kota Makassar. (Makassar: FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol 03 No 02 November 2018), Hal. 19

⁸ Beby Masitho. Dinamika Politik Pembangunan Pada Masa Orde Baru (Studi Tentang Industrialisasi Ketergantungan dan Peran Modal Jepang). (Jurnal Perspektif Universitas Medan Area Volume 6 No. 2 Oktober 2013), Hal. 23

cita politik. Tanpa berpikir rasional, para politisi cenderung menjadi hewan predator, atau pemangsa suara rakyat yang telah terjadi pada pemilu kepala daerah dan pemilu anggota legislatif yang baru berakhir, dengan ditetapkan anggota legislatif terpilih pada tingkat lokal dan tingkat nasional.

Latar belakang pendidikan tak melulu menunjukkan hasil yang optimal terhadap kompetensi seorang politisi. Sebagaimana sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara latar belakang pendidikan dan kinerja anggota legislatif dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut menampilkan hasil yang cukup dengan menunjukkan bahwa tak ada hubungan yang disignifikan di antara keduanya. Bahkan pada penelitian ini, pengalaman politik justru lebih banyak berpengaruh terhadap kinerja anggota legislatif⁹.

Keputusan yang cukup terbilang berlawanan dengan argumentasi di atas ialah fenomena maraknya pelibatan selebriti sebagai aktor politik. Di mana dalam kontes pemilihan legislatif tahun 2018, sebuah keputusan yang terbilang cukup unik dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di Indonesia. Di mana total sebanyak 79 aktor yang berlatarbelakang selebriti diketahui maju membawa nama baik partai politik sebagai kandidat anggota legislatif (Putri, 2017).

Hal tersebut menyimpulkan bahwa pemanfaatan gelar akademik atau pun latar belakang pendidikan tidak serta merta dapat memberi

⁹ Ferdinant Nuru. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Politik terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD. (Jurnal Accountability Vol.2 No.1 Juni 2013), Hal. 9

respon positif terhadap pembangunan citra kandidat politik. Dalam pendekatan dramaturgi yang dikemukakan oleh Hebert Mead, keberhasilan sebuah aktor atau dalam hal ini kandidat politik sangat bergandung dari strateginya memainkan panggung depan (*front stage*)¹⁰. Dimana pada panggung depan terdapat dua unsur yang harus diperankan secara baik guna memberi pengaruh yang positif terhadap konstituen, yakni *personal font* dan *setting*. Dimana *personal font* merupakan serangkaian tindakan yang digunakan aktor dalam menampilkan dirinya. Sementara, *setting* merupakan situasi fisik yang harus terbangun ketika aktor menampilkan dirinya.

Nurdin Abdullah merupakan kepala daerah pertama di Indonesia yang bergelar profesor. Pria kelahiran Pare-Pare 7 Februari ini menyanggah gelar profesor di bidang agrikultur. Di karir akademisnya, Nurdin juga sempat menjabat Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassar selain di bidang akademisi, Nurdin juga menjabat sejumlah posisi penting di perusahaan-perusahaan Jepang. Diantaranya Presiden Direktur PT Maruki Internasional Indonesia, President Director of Global Seafood Japan, dan Director of Kyushu Medical Co. Ltd. Japan. Kemudian Nurdin memutuskan untuk masuk ke dunia politik dengan menjadi Bupati Bantaeng selama dua periode. Di masa kepemimpinan inilah, Nurdin

¹⁰ Deddy Mulyana, Nuansa-Nuansa Komunikasi, Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer. (Bandung: PT. Remadja Rosdakarya. 2011), Hal 122-126

memanfaatkan keahliannya di bidang pertanian membawa Bantaeng keluar dari kategori daerah tertinggal.

Dikutip dari website Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Nurdin membawa Bantaeng sebagai kabupaten benih berbasis teknologi. Ia memulai dengan terlebih dahulu merevitalisasi kelembagaan petani dan kelompok tani serta mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sehingga berbadan hukum. Untuk meningkatkan komoditas unggul, Nurdin bersama masyarakat menerapkan pola zonasi wilayah pengembangan untuk pengembangan komoditas unggulan, termasuk untuk komoditas ekspor. Alhasil, terobosan-terobosan ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Bantaeng dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk meningkatkan peran Bantaeng di Sulawesi Selatan sebagai kabupaten produktivitas terbaik di berbagai bidang.

Beberapa pertimbangan di atas sangat menunjukkan bahwa pencitraan politik merupakan hal sangatlah kaya pertimbangan. Dalam konteks Nurdin Abdullah aspek pendidikan merupakan hal yang penting, tetapi beberapa penelitian terlihat bertolak belakang dengannya. Hal tersebut kemudian, memberi sinyal kepada peneliti untuk menyusun sebuah program penelitian dengan mengangkat judul penelitian: **Gelar Akademik Terhadap Citra Politik (Studi Kasus Pemanfaatan Gelar Professor Sebagai Atribut Politik Nurdin Abdullah Pada Pilgub Sulawesi Selatan Tahun 2018).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana pemanfaatan gelar akademik (professor) dalam membangun citra positif Nurdin Abdullah pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Politik yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Politik, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pemanfaatan gelar akademik (professor) sebagai atribut politik dalam pembangunan citra positif Nurdin Abdullah pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada Pilkada Serentak 2018.

1.4 Manfaat penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi pengembangan ilmu politik di indonesia, khususnya dalam kajian pencitraan politik.

2. Menambah pengetahuan teoritis bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu politik kajian pencitraan politik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap perkembangan kajian mengenai politik pencitraan, khususnya dalam pemilihan kepala daerah.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk kebutuhan penelitian. Penjelasan terkait pemanfaatan gelar akademik Nurdin Abdullah pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2018 memerlukan pendekatan teoritis yang tepat agar tulisan ini mampu memahami dan menguraikan temuan penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini secara garis besar terdiri dari penggambaran konsep, yakni konsep politik pencitraan, dan interaksionalisme simbolik, serta penggambaran konsep dramaturgi politik. Pada bab ini terdapat pula uraian mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan konsep dan objek penelitian yang dikaji.

2.1 Politik Pencitraan

Politik pencitraan secara garis besar merupakan strategi atau upaya yang dapat dikatakan sudah menjadi hal yang lumrah digunakan oleh kandidat politik dalam upaya memenangkan kontestasi. Strategi ini merupakan tindakan yang berupaya membangun kesan positif di mata masyarakat pemilih, dengan menggunakan beberapa atribut yang dinilai efektif, dalam upaya mempengaruhi pilihan publik.

Dalam rangka memahami pemanfaatan gelar akademik oleh Nurdin Abdullah konsep politik pencitraan merupakan konsep yang sangat

membantu dalam menganalisis fenomena tersebut. Oleh karena itu penulis dalam sub bab ini menguraikan detail mengenai konsep ini sebagai berikut:

2.1.1 Pemahaman tentang Pencitraan

Citra berasal dari bahasa sansekerta yang berarti gambar yang kemudian dikembangkan menjadi gambaran sebagai persamaan kata image dalam bahasa Inggris. Pada hakikatnya citra dapat didefinisikan sebagai konstruksi atau representasi dan persepsi khalayak terhadap individu (Anwar, 2014:16)¹¹.

Sedangkan citra politik diartikan sebagai gambaran tentang politik yang mencakup pengaruh (*influenze*), wewenang (*authority*), kekuasaan (*power*) atau kekuatan (*force*), kerjasama (*cooperations*), konflik (*conflict*), dan kompromi (*consensus*)¹².

Ditinjau dari sudut kesejarahan, pencitraan sebagaimana dijelaskan Rendro Dhani sudah dilakukan manusia seiring dengan perkembangan peradabannya. Para pemimpin suku primitif misalnya, berkepentingan menjaga reputasi mereka dengan melakukan pengawasan terhadap para pengikutnya melalui pemanfaatan simbol, kekuatan, hal-hal yang bersifat magis, tabu, atau supranatural. Pada zaman Mesir Kuno, untuk memelihara kesan publik akan keagungan rajanya maka didirikanlah bangunan-bangunan semacam piramida dan spinx dan memposisikan raja sebagai tuhan. Pada masa perkembangan peradaban Yunani dan Romawi,

¹¹ Anwar Arifin, Politik Pencitraan Politik. (Yogyakarta: Graha. Ilmu, 2014), Hal. 16

¹² Ibit, Hal. 23

kesadaran akan pentingnya opini publik dan pencitraan juga sangat kuat. Karya seni dan sastra pada masa itu banyak diarahkan untuk menguatkan reputasi raja. Kaum bangsawan istana umumnya adalah ahli-ahli persuasi dan retorika yang luar biasa. Karya pidato Cicero, tulisan bersejarah Julius Caesar, bangunan-bangunan dan ritual saat itu banyak digunakan sebagai media pembentukan opini publik dan pencitraan¹³.

Pencitraan yang awalnya identik dengan kegiatan kehumasan (public relations) dalam dunia bisnis, bergeser pada kegiatan politik, sehingga dinamika perpolitikan erat dengan istilah pencitraan. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra yang baik pada khalayak. Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya dari media. Pencitraan berasal dari kata citra yang didefinisikan para pakar secara berbeda-beda dan pada hakikatnya sama maknanya.

Pemaknaan citra merupakan hal yang abstrak, karena citra tidak dapat diukur secara sistematis meskipun wujudnya dapat dirasakan baik positif maupun negatif. Penerimaan dan tanggapan, baik positif maupun negatif tersebut datang dari publik atau khalayak. Citra terbentuk sebagai akumulasi dari tindakan maupun perilaku individu yang kemudian mengalami suatu proses untuk terbentuknya opini publik yang luas. Pada dasarnya citra berakar dari nilai-nilai kepercayaan yang secara nyata

¹³ Rendro Dhani, Centang Perenang Manajemen Komunikasi Kepresidenan dari Soekarno Sampai Megawati. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), Hal. 10

diberikan secara individual dan merupakan pandangan atau persepsi. Seorang tokoh populer (public figure) dapat menyanggah citra baik atau buruk. Kedua hal tersebut bersumber dari citra-citra yang berlaku dan terbentuk dari hal-hal yang dilakukan tokoh tersebut baik bersifat positif maupun negatif. Pencitraan pada diri seorang public figure misalnya, dibentuk oleh pencitraan diri yang diolah secara sengaja sedemikian rupa. Harapan dari pencitraan itu adalah mendapat citra positif di mata masyarakat luas. Akan tetapi pencitraan tersebut tidak selalu menghasilkan opini publik yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelaku pencitraan. Hal itu disebabkan karena latar belakang, status sosial, ekonomi, perbedaan pengalaman, serta aspek-aspek lain dapat mempengaruhi pemaknaan terhadap pencitraan yang dibangun.

Citra dapat didefinisikan sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi khalayak terhadap individu, kelompok atau lembaga yang terkait dengan kiprahnya dalam masyarakat. Memaknai citra sebagai kesan, perasaan dan gambaran dari publik terhadap perusahaan atau kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi Berdasarkan definisi tersebut, Soemirat kemudian menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang terkait dalam proses pencitraan, yaitu:

- a) Persepsi, yaitu hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain individu akan memberikan makna terhadap rangsangan berdasarkan

pengalamannya mengenai suatu produk. Kemampuan mempersepsi itulah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra.

- b) Kognisi, yaitu suatu keyakinan diri individu terhadap stimulus. Keyakinan itu akan timbul apabila individu telah mengerti rangsangan itu sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup dan dapat mempengaruhi perkembangan informasinya.
- c) Motif, yaitu keadaan dalam individu yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.
- d) Sikap, yaitu kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu.

Pemaknaan citra yang lain disampaikan Ruslan yang memandang citra adalah sesuatu yang abstrak atau intangible, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian, penerimaan, kesadaran, dan pengertian seperti tanda respek dan rasa hormat, dari publik atau masyarakat luas kepada perusahaan ataupun personelnnya yang dipercaya, profesional, dan dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan yang baik. Sedangkan Kotler menjelaskan makna citra sebagai jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang dimiliki seseorang pada suatu

objek. Objek yang dimaksud bisa berupa orang, organisasi, kelompok atau yang lainnya yang dia ketahui¹⁴.

Dari dua penjelasan ini, dapat dipahami bahwa citra adalah sebagai gambaran yang terdapat dalam pikiran orang lain. Untuk penguatan citra, ada pesan tunggal yang menunjukkan keunggulan utama dan posisi produk. Pesan juga bisa dibuat dengan sifat yang unik, sehingga tidak memiliki perbedaan dengan pesan yang disampaikan competitor lainnya. Pesan tersebut pun harus memiliki kekuatan emosional untuk membangkitkan perasaan selain pikiran pembeli. Sebab itu, citra dapat berubah menjadi buruk apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa citra dapat terbentuk sepenuhnya oleh bagaimana lembaga mampu membangun persepsi yang didasarkan oleh realitas yang terjadi. Semua proses yang terjadi ini tentunya dibangun dengan nilai kredibilitas pihak perusahaan, lembaga atau organisasi. Citra dapat juga dipahami sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi khalayak terhadap individu, kelompok atau lembaga yang terkait dengan kiprahnya dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Kaid, citra dalam politik dibuat melalui penggunaan tayangan visual yang dikomunikasikan melalui penampilan di media, sampai informasi terintegrasi dalam pikiran masyarakat.

¹⁴ Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian. Alih bahasa Ancella Anitawat Hermawan. (Jakarta : Salemba, 1994), Hal. 401

2.1.2 Pencitraan Dalam Konteks Politik

Bila diikuti dinamika perpolitikan di Indonesia, pencitraan menjadi istilah yang akrab di telinga setiap masyarakat Indonesia. Istilah ini semakin menguat, ketika kaum akademisi maupun praktisi menjadikannya sebagai kajian-kajian akademik dan diskusi ilmiah dalam berbagai kesempatan. Saat ini, hampir semua pihak yang berkepentingan dengan opini publik menyadari pentingnya mengelola citra.

Hasil studi Fritz Plasser, menunjukkan faktor pertama yang mempengaruhi peluang kandidat untuk kemenangan pemilu di Eropa adalah image atau citra. Citra sebagai kunci kemenangan dalam pemilihan kepala daerah juga menjadi hal yang seringkali terjadi di Indonesia. Nurdin Abdullah yang merupakan aktor politik yang juga terlibat dalam usaha pembentukan citra untuk memperoleh dukungan di masyarakat.

Kekuasaan (power) dapat dipandang sebagai titik sentral studi politik. Proses politik memiliki hubungan satu sama lain dengan kekuasaan, yakni kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai hubungan sosial di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok ke arah yang lain. Apabila dikaitkan dengan kehidupan politik dan kenegaraan, maka kekuasaan memiliki berkaitan dengan pengaruh (*influenze*), wewenang (*authority*), dan kekuatan (*force*).

Sumber kekuasaan pada kepemimpinan terdapat pada kepemimpinan rasional, tradisional, dan kharismatik. Kepemimpinan yang

rasional bersumber pada kewenangan dari legalitas pola-pola peraturan normative. Kepemimpinan tradisional terdapat pada kepercayaan yang sudah mapan terhadap tradisi. Sedangkan pemimpin kharisatik berpegang pada kekaguman masyarakat terhadap pemimpin yang memiliki kelebihan. Langkah pertama dalam strategi komunikasi untuk pencitraan politik ialah dengan cara merawat ketokohan. Citra politik yang dimaksud itu ialah politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, kejujuran, keberanian, dan sebagainya. Dalam retorika politik, hakikatnya khalayak akan memperhatikan siapa (tokoh politik) dari pada apa (pesan) yang akan disampaikan. Dengan demikian ketokohan dapat melahirkan kharisma yang diperoleh karena kredibilitas dan moralitas terpuji¹⁵.

Langkah kedua dari seorang komunikator politik untuk mencapai tujuannya adalah menciptakan pengaruh (*influenze*) melalui kebersamaan antara politikus dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya suasana homofili. Suasana yang harus diciptakan antara politikus dan khalayak adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), persamaan busana, persamaan kepentingan dengan khalayak terutama mengenai pesan politik (Anwar, 2006:64).

Konflik atau perselisihan merupakan tanda dari setting politik. Proses politik tersebut terjadi dalam rangka konflik dan konsensus atau kompromi. Upaya mencari kompromi dari konflik politik, diperlukan seni berkompromi.

¹⁵ Anwar Arifin. Opcit

Adanya konflik tersebut juga diturunkan melalui komunikasi dengan penyelesaian melalui kompromi atau konsensus. Anwar arifin menambahkan bahwa pembicaraan politik juga berkaitan dengan kerjasama (*cooperations*). Peserta komunikasi politik biasanya akan menyelesaikan konflik politik dengan kompromi, dengan demikian juga terdapat upaya untuk menjalin kerjasama¹⁶

Citra politik terbentuk berdasarkan informasi yang diterima melalui media baik media sosial maupun media massa. Citra politik mencakup beberapa hal, yaitu:

- 1) Seluruh pengetahuan politik seseorang (kognisi)
- 2) Semua referensi (afeksi) yang melekat kepada tahap tertentu dari peristiwa politik yang menarik,
- 3) Semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang terjadi jika berperilaku dengan cara yang berganti-ganti terhadap objek dalam situasi.

Citra politik selalu berubah sesuai dengan berubahnya pengetahuan politik dan pengalaman politik seseorang¹⁷

Pencitraan politik menurut Firmanzah harus mengandung dua unsur, yaitu: unsur emosi (afeksi) dan aspek penalarana (kognisi), karena citra mengandung aspek rasional dan unsur emosional sekaligus, sehingga memiliki sifat subjektif dan objektif. Citra politik tersusun melalui persepsi

¹⁶ Ibid, Hal 110

¹⁷ Ibid, Hal 181

yang bermakna tentang gejala politik dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi opini publik.

Citra politik seseorang akan membantu pemahaman, penilaian, dan pengidentifikasian peristiwa, tujuan, gagasan, ataupun pemimpin politik. Citra politik sangat berkaitan dengan berbagai macam identitas seorang tokoh politik, dan merupakan rangkaian atribut yang diberikan oleh pihak luar membentuk entitas seorang tokoh partai politik.

Keputusan Nurdin Abdullah untuk maju dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan pada pilkada serentak 2018, tentunya membutuhkan strategi politik yang baik. Menghadapi beberapa kandidat-kandidat yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan, membuat Nurdin Abdullah butuh sebuah identitas yang kuat, yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu citra sebagai akademisi atau "Professor" menjadi identitas yang digunakan oleh Nurdin Abdullah dalam pilkada serentak 2020. Citra sebagai seorang terdidik yang melekat di masyarakat mengenai Nurdin Abdullah akan berdampak pada popularitas dan elektabilitasnya.

Pengertian citra (*image*) itu sendiri adalah gambaran manusia mengenai sesuatu, atau citra adalah persepsi akan sesuatu yang ada di benak seseorang dan citra tersebut tidak selamanya sesuai dengan realitas sesungguhnya. Sementara menurut Peteraf dan Shanley yang dikutip oleh Firmanzah menyebutkan, citra bukan sekedar masalah persepsi atau

identifikasi saja, tetapi juga memerlukan pelekatan (attachment) suatu individu terhadap kelompok atau grup. Pendekatan ini dapat dilakukan secara rasional (kognitif) maupun emosional (afektif)¹⁸.

Dalam konteks politik, pendekatan kognitif beranggapan bahwa masyarakat akan menilai dan kemudian memilih pemimpin politik yang program kerjanya paling rasional. Maka dari itu, yang menjadi perhatian Nurdin Abdullah ketika membangun relasi dengan masyarakat seperti adalah menampilkan pesan kepada masyarakat mengenai pendaulatan dirinya sebagai pemimpin yang transformatif, lewat segudang prestasi yang pernah diraihinya selama menjabat sebagai bupati Kabupaten Bantaeng selama dua periode. Kemampuan pencitraan Nurdin Abdullah berhasil mengubah pandangan masyarakat Indonesia tentang Bantaeng yang semula daerah tertinggal dan kini cukup maju dalam berbagai sektor sepanjang kepemimpinan Nurdin Abdullah.

Pentingnya pencitraan dalam peta politik juga dijelaskan Yasraf Amir Piliang sebagaimana dikutip Tinarbuko, bahwa dalam politik abad informasi, citra politik seorang tokoh yang dibangun melalui aneka media cetak dan elektronik seakan menjadi mantra yang menentukan pilihan politik. Melalui mantra elektronik itu, maka persepsi, pandangan dan sikap politik masyarakat dibentuk bahkan dimanipulasi. Ia juga telah menghanyutkan para elit politik dalam gairah mengkonstruksi citra diri,

¹⁸ Firmanzah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), Hal. 233-240

tanpa peduli relasi citra itu dengan realitas sebenarnya. Politik kini menjelma menjadi politik pencitraan, yang merayakan citra ketimbang kompetensi politik.

2.2 Teori Interaksionalisme Simbolik

Interaksionisme simbolik merupakan interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Dalam rangka memahami pemanfaatan gelar akademik oleh Nurdin Abdullah, interaksionalisme simbolik merupakan konsep yang sangat membantu dalam menganalisis fenomena tersebut. Oleh karena itu penulis dalam sub bab ini menguraikan detail mengenai konsep ini sebagai berikut:

2.2.1 Mengenal Interaksionalisme Simbolik

Interaksi merupakan proses dimana kemampuan berpikir dikembangkan dan diperlihatkan. Semua jenis interaksi memperbesar kemampuan kita untuk berpikir. Dalam kebanyakan interaksi, aktor harus memperhatikan orang lain dan menentukan kapan dan bagaimana cara menyesuaikan aktivitasnya terhadap orang lain.

Teori interaksionisme-simbolik dikembangkan oleh kelompok The Chicago School dengan tokoh-tokohnya seperti Goerge Herbert Mead dan Herbert Blummer. Awal perkembangan interaksionisme simbolik dapat dibagi menjadi dua aliran yaitu salah satunya aliran Chicago, yang dipelopori oleh Herbert Blumer, melanjutkan penelitian yang dilakukan

George Herbert Mead. Blumer meyakini bahwa studi manusia tidak bisa diselenggarakan di dalam cara yang sama dari ketika studi tentang benda mati¹⁹.

Teori Interaksi Simbolik yang masih merupakan pendatang baru dalam sosial, yaitu sekitar awal abad ke-19 yang lalu. Sampai akhirnya teori interaksi simbolik terus berkembang sampai saat ini, dimana secara tidak langsung merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional²⁰.

Interaksi simbolik merupakan salah satu perspektif yang sangat menonjolkan peran individu, dimana dalam perpektif ini individu dianggap memiliki esensi kebudayaan dalam dirinya, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna "buah pikiran" yang disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu, akan mempertimbangkan sisi individu tersebut, inilah salah satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran interaksionisme simbolik.

Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu (Soeprapto. 2007). Banyak ahli di belakang perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep kemasyarakatan.

¹⁹ George Ritzer dan Douglas, Teori Sosiologi Modern (terj). (Jakarta: Prenada Media, 2007), Hal. 292

²⁰ Elvinaro Ardianto, . Komunikasi Massa Suatu Pengantar. (Bandung : Simbosa Rekatama Media, 2007), Hal. 40

Pendekatan ini menjelaskan bahwa individu merupakan objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Menurut Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes (1993) dalam West-Turner (2008: 96), interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia.

Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*Mind*) mengenai diri (*Self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (*Society*) dimana individu tersebut menetap. Seperti yang dicatat oleh Douglas (1970)²¹ makna itu berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna, selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi.

Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain:

- 1) Pikiran (*Mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain,

²¹ Ibid Hal. 136

- 2) Diri (*Self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*The-Self*) dan dunia luarnya
- 3) Masyarakat (*Society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya

"*Mind, Self and Society*" merupakan karya George Harbert Mead yang paling terkenal (Mead, 1934 dalam West-Turner, 2008: 96)²², dimana dalam buku tersebut memfokuskan pada tiga tema konsep dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi mengenai teori interaksi simbolik.

Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain:

- 1) Pentingnya makna bagi perilaku manusia;
- 2) Pentingnya konsep mengenai diri;
- 3) Hubungan antara individu dengan masyarakat.

Tema pertama pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi

²² Ibid Hal. 140

simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi secara interpretatif oleh individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara bersama. Hal ini sesuai dengan tiga dari tujuh asumsi karya Herbert Blumer (1969) dalam West-Turner (2008: 99)²³ dimana asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka;
- 2) Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia;
- 3) Makna dimodifikasi melalui proses interpretatif.

Tema kedua pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya "Konsep diri" atau "*Self-Concept*". Dimana, pada tema interaksi simbolik ini menekankan pada pengembangan konsep diri melalui individu tersebut secara aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya. Tema ini memiliki dua asumsi tambahan, menurut LaRossan & Reitzes (1993) dalam West-Turner (2008: 101), antara lain:

- 1) Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain.
- 2) Konsep diri membentuk motif yang penting untuk perilaku.

Tema terakhir pada interaksi simbolik berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan masyarakat, dimana asumsi ini mengakui

²³ Ibid Hal. 141

bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya tiap individu-lah yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah:

- 1) Orang dan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial.
- 2) Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.

Rangkuman dari hal-hal yang telah dibahas sebelumnya mengenai tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang berkaitan dengan interaksi simbolik, dan tujuh asumsi-asumsi karya Herbert Blumer (1969)²⁴ adalah sebagai berikut:

Tiga tema konsep pemikiran Mead:

- 1) Pentingnya makna bagi perilaku manusia;
- 2) Pentingnya konsep diri; dan
- 3) Hubungan antara individu dengan masyarakat.

Dari tiga konsep tersebut, diperoleh tujuh asumsi karya Herbert Blumer (yang merupakan murid Mead) yaitu:

- 1) Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka.
- 2) Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia.
- 3) Makna dimodifikasi melalui sebuah proses interpretif.

²⁴ Ibid, Hal. 142

- 4) Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain.
- 5) Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku.
- 6) Orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial.
- 7) Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.

2.2.2 Interaksionalisme Simbolik Dalam Memahami Pencitraan Politik

Pendekatan interaksionalisme simbolik menekankan upaya untuk mempelajari lebih jauh dari interaksi sosial masyarakat, dan mengacu dari penggunaan simbol-simbol yang pada akhirnya akan dimaknai secara kesepakatan bersama oleh masyarakat dalam interaksinya.

Dalam pendekatan ini, pencitraan politik dapat disebut sebagai konstruksi sosial yang dibangun oleh kandidat politik melalui serangkaian proses interaksi terhadap masyarakat. Interaksi yang dimaksud ialah serangkaian upaya komunikatif yang dibangun oleh kandidat politik sebelum dan saat kampanye politik berlangsung.

Dalam tahap tersebut interaksi simbolik berlangsung, melalui stimulus yang diberikan oleh kandidat politik kepada para masyarakat konstituen, dengan harapan dapat mempengaruhi pemahaman pemilih mengenai kandidat mana yang paling layak untuk menjadi pemimpin. Stimulus dapat berupa serangkaian simbol-simbol atau makna yang tentunya dapat memberi kontribusi positif terhadap ke-diri-an sang

kandidat politik. Seperti pada kasus Nurdin Abdullah yang menggunakan gelar akademi pada kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018.

Gelar akademik tentunya telah memiliki makna tertentu dalam benak sebagian besar masyarakat konstituen. Dan bagi kandidat politik yang menggunakannya, simbol tersebut tentunya diharapkan mampu memberi pengaruh positif terhadap upaya pembangunan citranya selama masa kampanye. Oleh karena itu, teori interaksionalisme simbolik merupakan pendekatan yang relevan untuk memahami pencitraan politik pada penelitian ini.

2.3 Dramaturgi Sebagai Implikasi Interaksionalisme Simbolik

Teori Dramaturgi merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan pertunjukkan sebuah drama. Dalam hal ini, manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Dalam rangka memahami pemanfaatan gelar akademik oleh Nurdin Abdullah, teori dramaturgi merupakan konsep yang sangat membantu dalam menganalisis fenomena tersebut. Oleh karena itu penulis dalam sub bab ini menguraikan detail mengenai konsep ini sebagai berikut:

2.3.1 Arti Penting Dramaturgi

Implikasi dari teori interaksi simbolik dapat dijelaskan dari beberapa teori salah satunya ialah teori dramaturgi. Teori ini berangkat dari kenyataan

bahwa individu memiliki kekuatan untuk memengaruhi masyarakat melalui serangkaian proses interaksi dan komunikasi yang menampilkan simbol-simbol tertentu.

Dramaturgi merupakan sebuah teori yang memandang kehidupan ini ibarat teater, dimana dalam interaksi sosial, manusia seperti melakukan pertunjukan di atas panggung, yang menampilkan atau memainkan peran-peran tertentu. Untuk memainkan peran tersebut, biasanya sang aktor menggunakan bahasa verbal dan menampilkan perilaku nonverbal tertentu serta mengenakan atribut-atribut tertentu, misalnya kendaraan, pakaian, dan aksesoris lainnya yang sesuai dengan perannya dalam situasi tertentu. Dalam kasus ini, aktor dituntut untuk memusatkan pikiran agar dia tidak keceplosan, salah bicara, kehilangan kendali diri, melakukan gerak-gerik, menjaga nada suara dan mengekspresikan wajah yang sesuai dengan situasi²⁵.

Menurut Goffman kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi “wilayah depan” (front region) dan “wilayah belakang” (back region). Wilayah depan merujuk kepada peristiwa sosial yang menunjukkan bahwa individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Mereka sedang memainkan perannya di atas panggung sandiwara di hadapan khalayak penonton. Sebaliknya wilayah belakang merujuk kepada tempat dan peristiwa yang memungkinkannya mempersiapkan perannya di wilayah depan. Wilayah

²⁵ Mulyana, Deddy. 1999. Nuansa-Nuansa Komunikasi, Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.

depan ibarat panggung sandiwara bagian depan (*front stage*) yang ditonton khalayak penonton, sedang wilayah belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang (*back stage*) atau kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri, atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan.

2.3.2 Komponen Dramaturgi

a. Panggung Depan

Goffman membagi panggung depan ini menjadi dua bagian yaitu front pribadi (*personal front*) dan *setting*. Personal front ini terdiri lagi atas *appereance* dan *manner*. *Appereance* adalah alat-alat yang dianggap khalayak sebagai perlengkapan yang dibawa aktor ke dalam setting, misalnya dokter diharapkan mengenakan jas dokter dengan stetoskop menggantung di lehernya, atau pejabat menggunakan jas, dan sebagainya. Sedangkan *manner* merupakan tindakan atau peran yang akan dimainkan. Hal ini mencakup bahasa verbal dan bahasa tubuh sang aktor. Misalnya, berbicara sopan, pengucapan istilahistilah asing, intonasi, postur tubuh, kespresi wajah, pakaian, penampakan usia dan sebagainya. Hingga derajat tertentu semua aspek itu dapat dikendalikan aktor.

Ciri yang relatif tetap seperti ciri fisik, termasuk ras dan usia biasanya sulit disembunyikan atau diubah, namun aktor sering memanipulasinya dengan menekankan atau melembutkannya, misalnya menghitamkan kembali rambut yang berubah dengan cat rambut. Sementara itu, *setting* merupakan situasi fisik yang harus ada ketika aktor melakukan pertunjukan

atau dengan kata lain, *setting* merupakan panggung yang secara fisik memungkinkan aktor untuk tampil. Misalnya seorang dokter bedah memerlukan ruang operasi, seorang sopir taksi memerlukan kendaraan, dan sebagainya.

Goffman mengakui bahwa panggung depan mengandung analisis struktural dalam arti bahwa panggung depan cenderung terlembagakan atau mewakili kepentingan kelompok atau organisasi. Sering ketika aktor melaksanakan perannya, peran tersebut telah ditetapkan lembaga tempat dia berada. Meskipun berbau struktural, daya tarik pendekatan Goffman terletak pada interaksi. Ia berpendapat bahwa umumnya orang-orang berusaha menyajikan diri mereka yang diidealisasikan dalam pertunjukan mereka di panggung depan, dan mereka merasa bahwa mereka harus menyembunyikan hal-hal tertentu dalam pertunjukannya²⁶.

Hal-hal yang perlu disembunyikan itu merupakan bagian dari diri aktor (manusia) yang tidak ingin diketahui oleh khalayak, karena dapat mengganggu atau merusak image ataupun peran yang dimainkan aktor tersebut. Ada beberapa hal yang disembunyikan (*Vested interest*) yaitu:

- 1) Kebiasaan-kebiasaaan tersembunyi atau *Secret pleasure*, misalnya meminum minuman keras sebelum pertunjukan.
- 2) Kesalahan yang dibuat saat persiapan pertunjukan, langkahlangkah yang diambil untuk memperbaiki kesalahan tersebut, misalnya sopir

²⁶ Ibid, Hal. 114-117

taksi menyembunyikan fakta bahwa ia mulai salah arah dengan terus menjalankan mobilnya.

- 3) Aktor mungkin merasa perlu menunjukkan hanya produk akhir dan menyembunyikan proses memproduksinya. Misal dosen menghabiskan waktu beberapa jam untuk memberi kuliah, namun mereka bertindak seolah-olah telah lama memahami materi kuliah tersebut.
- 4) Aktor mungkin perlu menyembunyikan “kerja kotor” yang dilakukan untuk membuat produk akhir dari khalayak (kerja kotor itu mungkin meliputi tugas-tugas yang “secara fisik kotor, semilegal, dan menghinakan”).
- 5) Dalam melakukan pertunjukan tertentu, aktor mungkin harus mengabaikan standar lain, misal menyembunyikan hinaan, pelecehan, atau perundungan yang dibuat sehingga pertunjukan dapat berlangsung²⁷

Aspek lain dari dramaturgi di panggung depan adalah bahwa aktor sering berusaha menyampaikan kesan bahwa mereka punya hubungan khusus atau jarak sosial lebih dekat dengan khalayak daripada jarak sosial yang sebenarnya (*Closer to the audience*). Namun di saat yang bersamaan, orang (aktor) juga menjaga jarak dengan khalayak (*mystification*) agar tetap terlihat berwibawa.

²⁷ Ritzer, Opcid Hal. 298-299

Goffman mengakui bahwa orang tidak selamanya ingin menunjukkan peran formalnya dalam panggung depannya. Orang mungkin memainkan suatu perasaan, meskipun ia enggan akan peran tersebut, atau menunjukkan keengganannya untuk memainkannya padahal ia senang bukan kepalang akan peran tersebut.

Akan tetapi menurut Goffman, ketika orang melakukan hal semacam itu, mereka tidak bermaksud membebaskan diri sama sekali dari peran sosial atau identitas mereka yang formal itu, namun karena ada perasaan sosial dan identitas lain yang menguntungkan mereka²⁸

b. Panggung Belakang

Panggung belakang atau *Back stage* adalah keadaan dimana aktor berada di belakang panggung, tanpa *audience*. sehingga dapat berperilaku bebas tanpa memedulikan plot perilaku bagaimana yang harus dibawakan di depan panggung atau ketika di depan audien. Di back stage aktor tanpa tekanan bagaimana harus tampil, bersifat informal. Kegiatan aktor yang harus disembunyikan karena merupakan hal-hal yang bertentangan dengan front stage dan fakta ini tidak diperlihatkan atau ditekan ketika aktor berada di panggung depan. Di *back stage* ini pulalah aktor bersantai, mempersiapkan diri, atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan.

²⁸ Ibid, Hal 299

2.4 Penelitian Yang Relevan

Terkait dengan penjabaran mengenai penelitian yang relevan, penulis menguarai beberapa penelitian dan mengelompokkannya ke dalam dua bagian, yakni penelitian yang relevan dengan gelar akademik dan penelitian yang relevan dengan penggunaan pendekatan dramturgi dalam kontestasi politik. Berikut adalah beberapa penelitian ilmu politik yang membahas mengenai pemanfaatan gelar akademik dalam konteks politik:

- 1) Penelitian "The Politics of Educational Credentials: Theory and Evidence from Indonesia" yang dilakukan oleh Sandra Kurniawati (2019)²⁹ bertujuan untuk menganalisis pengaruh gelar akademik terhadap kinerja politik dan keterpilihan calon legislatif (caleg) di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori agensi untuk menganalisis peran gelar akademik dalam politik. Teori agensi menunjukkan bahwa pemilih cenderung memilih kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi dan dianggap mampu mewakili kepentingan mereka.

Penelitian ini menggunakan data dari Pemilu Legislatif 2014 di Indonesia dan melakukan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara gelar akademik dan kinerja politik serta keterpilihan caleg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelar akademik memiliki

²⁹ Sandra Kurniawati, dkk, The Politics of Educational Credentials: Theory and Evidence from Indonesia. (Journal of Southeast Asian Economies Vol. 35, No. 2, 2019), Hal. 187

pengaruh positif terhadap kinerja politik dan keterpilihan caleg di Indonesia. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh gelar akademik ini lebih kuat pada kandidat yang berasal dari partai politik yang lebih besar dan memiliki lebih banyak sumber daya.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya gelar akademik dalam politik di Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi kinerja politik dan keterpilihan caleg. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya partai politik dalam mempengaruhi pengaruh gelar akademik pada kinerja politik dan keterpilihan caleg."Professors as Politicians: An Empirical Analysis of the Linkages between Academic Careers and Political Roles" (Debenedetti et al., 2014): Penelitian ini menginvestigasi pengaruh gelar akademik terhadap karir politik di Italia. Penelitian ini menemukan bahwa profesor yang terlibat dalam politik cenderung lebih berhasil dalam pemilihan umum dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi pejabat pemerintahan.

- 2) Penelitian "What Do Doctors Bring to Politics? Evidence from the Philippines" yang dilakukan oleh de la Paz et al. (2018)³⁰ bertujuan untuk menganalisis pengaruh latar belakang dokter pada kinerja politik dan keterpilihan kandidat di Filipina.

³⁰ Dr. Roberto de La Paz, What Do Doctors Bring to Politics? Evidence from the Philippines, Health Systems in Transition Vol. 8 No. 2 2018), Hal. 87

Penelitian ini menggunakan data dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2016 di Filipina dan melakukan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh latar belakang dokter pada kinerja politik dan keterpilihan kandidat. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pengalaman kandidat dokter dalam kampanye politik dan pengaruh latar belakang dokter pada pandangan politik mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandidat yang memiliki latar belakang dokter cenderung lebih berhasil dalam kampanye politik dan memiliki keterpilihan yang lebih tinggi. Hal ini kemungkinan karena dokter memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin dan mengambil keputusan yang baik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa latar belakang dokter dapat mempengaruhi pandangan politik kandidat. Kandidat yang memiliki latar belakang dokter cenderung lebih peduli pada masalah kesehatan dan lingkungan, dan lebih berfokus pada pengembangan kebijakan kesehatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh latar belakang dokter pada politik dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kinerja politik dan keterpilihan kandidat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa latar belakang dokter dapat

mempengaruhi pandangan politik kandidat dan bagaimana mereka berfokus pada isu-isu tertentu dalam kampanye politik.

- 3) Penelitian "The Relationship between Educational Attainment and Political Success" oleh Enlow et al. (2018)³¹, bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat pendidikan dan kesuksesan politik di Amerika Serikat.

Penelitian ini menggunakan data dari American National Election Studies (ANES) untuk menguji apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik, dukungan terhadap partai politik, dan partisipasi dalam kampanye politik. Penelitian ini juga melakukan analisis regresi untuk mengontrol variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara pendidikan dan kesuksesan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik, dukungan terhadap partai politik, dan partisipasi dalam kampanye politik. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik, memiliki dukungan yang lebih kuat terhadap partai politik tertentu, dan lebih cenderung untuk terlibat dalam kampanye politik.

³¹ Enlow, dkk. Revisiting the Relationship between Educational Attainment and Political Sophistication (The Journal of Politics 71(04):1564 – 1576 DOI:10.1017/S0022381609990077)

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dan kesuksesan politik dapat bervariasi tergantung pada jenis partisipasi politik yang diukur. Sebagai contoh, tingkat pendidikan tidak selalu memiliki hubungan yang signifikan dengan memenangkan pemilihan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan kesuksesan politik di Amerika Serikat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis partisipasi politik yang diukur.

- 4) Penelitian "Professors as Politicians: An Empirical Analysis of the Linkages between Academic Careers and Political Roles" oleh DeBenedetti et al. (2014)³² bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karir akademik dan peran politik di Italia.

Penelitian ini menggunakan data dari sekitar 6.000 profesor di Italia dan menganalisis apakah terdapat hubungan antara pengalaman akademik dan partisipasi politik, serta apakah terdapat kecenderungan untuk memasuki jenis-jenis posisi politik tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman akademik memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi politik di Italia. Profesor dengan pengalaman akademik yang lebih lama lebih cenderung

³² DeBenedetti, dkk, *Professors as Politicians: An Empirical Analysis of the Linkages between Academic Careers and Political Roles*. (New York, New York: Oxford University Press, 2014)

untuk terlibat dalam politik dan menduduki posisi politik yang lebih tinggi, seperti menjadi anggota parlemen atau menteri.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan untuk memasuki jenis-jenis posisi politik tertentu berdasarkan bidang akademik yang ditekuni. Sebagai contoh, profesor bidang ilmu politik cenderung untuk memasuki posisi-posisi yang terkait dengan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang hubungan antara karir akademik dan peran politik di Italia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengalaman akademik dapat memberikan keuntungan dalam konteks politik, terutama dalam hal memasuki posisi politik yang lebih tinggi.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa gelar akademik dapat mempengaruhi citra politik dan kinerja pejabat pemerintahan dalam konteks politik. Namun, perlu diingat bahwa gelar akademik bukanlah satu-satunya faktor dalam membangun citra politik yang baik, karena integritas, kinerja, dan kemampuan untuk berkomunikasi juga sangat penting dalam membentuk citra politik yang positif.

Berikut adalah beberapa penelitian ilmu politik yang menggunakan pendekatan dramaturgi dalam konteks politik:

1) Penelitian "Performing Politics: Image, Character, and Style in Political Campaigns" oleh Jackson & Lilleker (2014)³³ bertujuan untuk mempelajari bagaimana politikus membangun citra dan karakter dalam kampanye politik mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis narasi kampanye politik dari sejumlah politikus di Inggris dan Amerika Serikat. Penelitian ini meneliti bagaimana politikus membangun citra dan karakter melalui narasi dan performa mereka di depan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politikus menggunakan berbagai strategi untuk membangun citra dan karakter mereka dalam kampanye politik. Beberapa strategi yang digunakan meliputi memperkenalkan diri, menekankan keberhasilan masa lalu, menunjukkan kredibilitas, dan menyoroti keterlibatan dengan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa citra dan karakter politikus sangat penting dalam memengaruhi persepsi publik terhadap mereka dan dalam memenangkan dukungan selama kampanye politik. Oleh karena itu, politikus harus memiliki kemampuan untuk

³³ Lilleker, dkk. The Social Media Campaign: Mobilisation and persuasion. (Journal of Information Technology & Politics Bournemouth University, 2014) Hal. 293 - 314

membangun citra dan karakter yang kuat dan meyakinkan untuk memenangkan dukungan dari publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana politikus membangun citra dan karakter dalam kampanye politik mereka dan menunjukkan betapa pentingnya citra dan karakter politikus dalam memenangkan dukungan publik.

- 2) Penelitian "Political Communication and Performance: Essays in Honor of John L. Sullivan" yang disunting oleh Croucher & Cronn-Mills (2013)³⁴ adalah kumpulan esai yang membahas topik komunikasi politik dan performa politik. Buku ini didedikasikan untuk menghormati kontribusi John L. Sullivan, seorang profesor di Departemen Komunikasi di Illinois State University.

Buku ini terdiri dari 13 esai yang ditulis oleh sejumlah akademisi dan pakar komunikasi politik. Topik yang dibahas dalam buku ini meliputi berbagai aspek dari komunikasi politik, seperti retorika politik, debat politik, kampanye politik, media massa, dan komunikasi politik di tingkat lokal dan internasional.

Beberapa esai menyoroti peran penting komunikasi politik dalam proses demokrasi dan bagaimana strategi komunikasi politik dapat memengaruhi persepsi publik dan hasil pemilihan. Esai lainnya

³⁴ Croucher & Cronn-Mills. Political Communication and Performance: Essays in Honor of John L. Sullivan. (Routledge, 2013), Hal 234

membahas bagaimana media massa memainkan peran dalam membentuk persepsi publik tentang politikus dan isu politik tertentu. Buku ini juga menyoroti pentingnya performa politik dalam membentuk citra politikus dan bagaimana penampilan, bahasa tubuh, dan gaya bicara politikus dapat mempengaruhi persepsi publik tentang mereka.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang komunikasi politik dan performa politik, serta menyoroti bagaimana faktor-faktor ini dapat memengaruhi hasil pemilihan dan persepsi publik tentang politikus dan isu politik..

- 3) Penelitian "The Theatre of Politics: New Labour, British Democracy, and the Arts" yang ditulis oleh David Bennett pada tahun 2009 membahas tentang bagaimana politik dan seni saling terkait di Inggris selama periode pemerintahan New Labour pada 1997-2007. Penelitian ini mengusulkan gagasan bahwa politik dan seni memiliki kesamaan dalam cara mereka beroperasi, terutama dalam hal dramaturgi dan naratif.

Bennett menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya, termasuk wawancara dengan tokoh politik, seniman, dan jurnalis, serta analisis media dan dokumen-dokumen pemerintah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa seni dapat dimanfaatkan sebagai alat politik untuk membentuk citra pemerintah, membangun hubungan dengan publik, dan meraih dukungan politik. Seni juga

berfungsi sebagai cara untuk merayakan dan memperkuat identitas nasional Inggris.

Namun demikian, Bennett juga mengkritik penggunaan seni sebagai alat politik yang terlalu mekanistik dan pandangan New Labour yang terlalu pragmatis dalam memanfaatkan seni. Bennett berpendapat bahwa seni seharusnya tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi yang memiliki nilai intrinsik dan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan sosial dan politik.

- 4) Penelitian "Performing Politics: Media, Voters, and Politicians in a Converging World" yang ditulis oleh Darren Lilleker dan Daniel Jackson pada tahun 2018 membahas tentang peran media dalam politik dan bagaimana politisi dan pemilih berinteraksi melalui media. Penelitian ini mengusulkan gagasan bahwa konvergensi media telah mengubah cara politisi berkomunikasi dengan pemilih dan telah mempengaruhi cara pemilih memperoleh informasi politik. Konvergensi media mengacu pada fenomena di mana berbagai bentuk media tradisional (cetak, radio, televisi) dan media baru (internet, media sosial) semakin saling terhubung dan saling mempengaruhi.

Lilleker dan Jackson menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitiannya, termasuk wawancara dengan politisi dan analisis konten media.

Penelitian ini menunjukkan bahwa media memainkan peran penting dalam membentuk citra politisi dan memengaruhi persepsi publik tentang politik. Politisi harus mampu menguasai berbagai bentuk media dan mengelola citra mereka dengan baik melalui media. Di sisi lain, pemilih harus mampu memilah informasi yang mereka peroleh dari media dan membuat keputusan politik yang tepat.

Namun demikian, Lilleker dan Jackson juga mengkritik pengaruh media yang terlalu besar dalam politik dan bahaya media yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi palsu atau memperkuat polarisasi politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa penting bagi politisi dan pemilih untuk memahami peran media dalam politik dan mengembangkan keterampilan untuk mengelola media secara efektif.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dramaturgi dapat digunakan dalam menganalisis citra politik dan strategi kampanye politik dalam konteks politik. Melalui pendekatan ini, kandidat dapat membangun citra politik yang sesuai dengan tuntutan opini publik dan memperkuat keterhubungan antara politik dan seni atau media.

2.5 Kerangka Pemikiran

Citra politik adalah kesan subyektif atau obyektif terhadap seseorang, organisasi, bangsa dan negara tertentu. Domain citra politik mencakup dua dimensi, yakni dimensi Kognitif dan dimensi Afektif. Dimensi Kognatif yakni kalkulasi atau pertimbangan rasional tertentu, sedangkan

Dimensi Afektif adalah sisi emosi atau perasaan seseorang terhadap suatu gejala, obyek, perilaku, sikap, dan tindakan tertentu. Membangun citra politik harus memperhatikan kedua dimensi tersebut secara proporsional sehingga terbentuk perasaan respek, sentimen secara utuh, kuat dan berkelanjutan³⁵.

Keberhasilan Nurdin Abdullah sebagai tokoh politik yang maju dalam ajang pemilihan gubernur Sulawesi Selatan pada Pilkada Serentak 2018 tidak terlepas dari kemampuan strategi pencitraan politiknya selama masa kampanye, meski Nurdin Abdullah yang berhadapan dengan lawan-lawan yang cukup berat, mulai dari dinasti politik Yasin Limpo dan juga petinggi Golkar Nurdin Halid.

Kemenangan itu tak terlepas dari strategi kampanye yang mengangkat Citra politik, Nurdin Abdullah sebagai professor atau "Prof". Ini merupakan gelar akademik, sebuah legitimasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Simbol "Prof" merupakan identitas legitimasi, yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial, seperti misalnya suatu institusi pendidikan yang mencoba memberi kepercayaan kepada masyarakat tentang seberapa kredibel orang-orang yang telah melalui jenjang ini. Sehingga dapat dinilai layak untuk menjadi panutan, tokoh masyarakat, bahkan menjadi sebuah pemimpin politik.

³⁵ Cangara, Opcit, Hal. 234

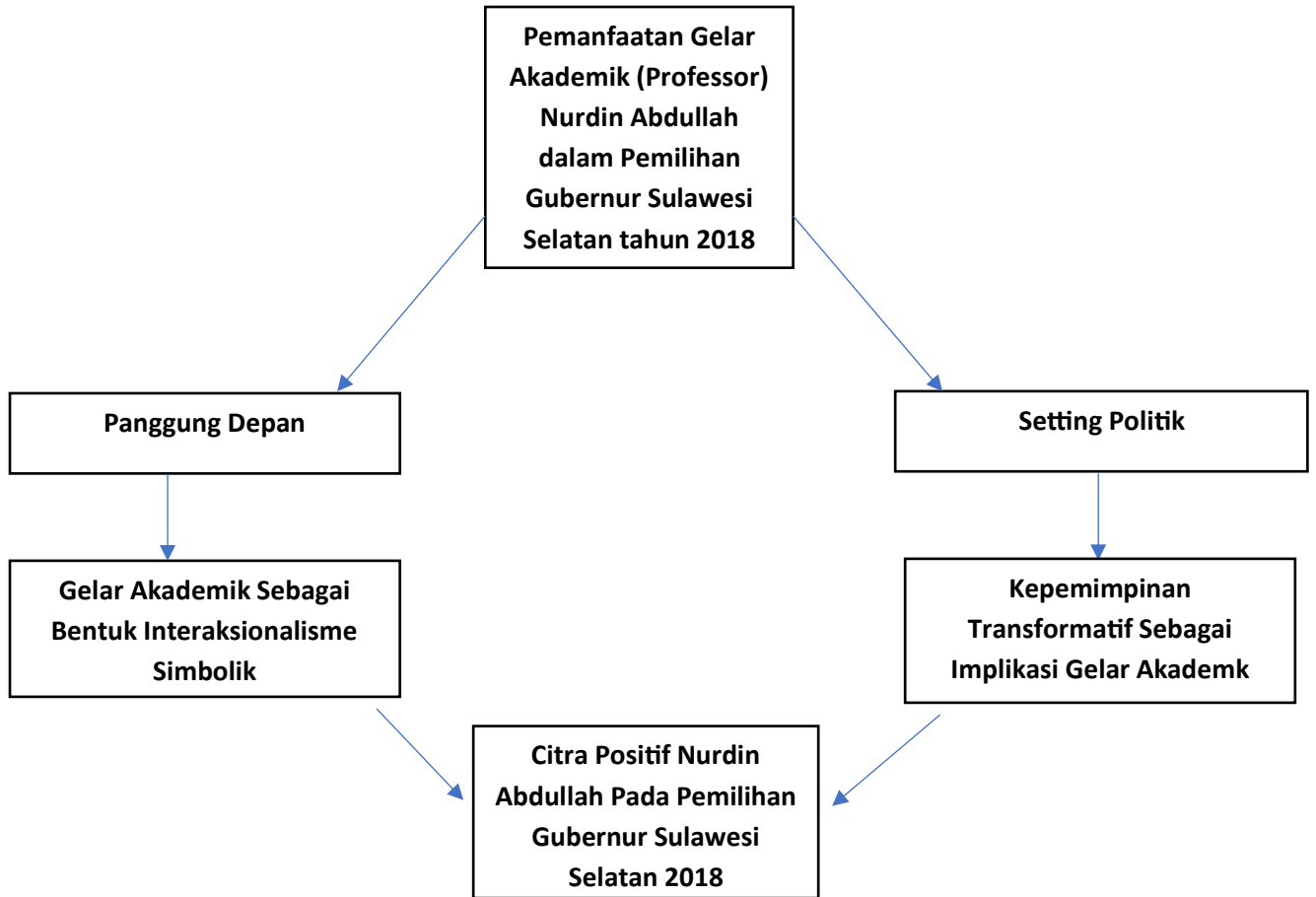
Pemanfaatan simbol “Prof” sebagai tagline dan spirit bagi pendidikan politik yang baik sesungguhnya tidak masalah. Namun, bila menjadi bagian dari permainan politik, apalagi disinyalir gelar tersebut adalah hasil praktik transaksional, maka hal demikian sangat berbahaya bagi kelangsungan dunia akademik. Pemanfaatan simbol “Prof” dinilai tak jauh bedanya, dengan pemanfaatan simbol-simbol agama juga dijadikan alat legitimasi dan strategi politik untuk menutup citra berbagai praktik politik yang berjalan secara transaksional.

Pemanfaatan gelar “Prof” menjadi sebuah persoalan lantaran kini dia dinilai tak lagi aktif mengabdikan di dunia akademik. Atau dengan kata kata lain, ia bukan lagi seorang akademisi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif mengajar atau mendidik pada perguruan tinggi.

Pandangan ini sejalan dengan pendekatan dramaturgi, yang dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para calon pemimpin politik dalam sebuah kontes politik ialah ibarat sedang menjalankan sebuah panggung sandiwara, dimana sebagai pelakon sebuah sandiwara, ia memainkan peran yang ia dapat sebaik mungkin agar publik (audience) mampu mengapresiasi dengan baik pementasan tersebut. Hal tersebut juga dilakukan oleh calon pemimpin politik beserta tim suksesnya yang berusaha menampilkan drama terbaik mereka di hadapan seluruh

konstituen. Drama yang dimainkan ini juga sangat di bantu oleh konstruksi media massa, baik cetak, elektronik termasuk juga televisi.

Dalam dunia politik, hal itu merupakan hal yang wajar-wajar saja dilakukan, apalagi ketika menyangkut persoalan kampanye, yang merupakan salah satu bentuk proses komunikasi politik. Ini merupakan hal cerdas yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah, sebab ini erbilang sebuah kampanye yang cerdas, pemanfaatan simbol “prof” adalah satu dari sekian banyak alternatif yang efektif, untuk memberikan impresi citra yang baik sehingga masyarakat tertarik memberikan dukungan di bilik suara. Tidaklah mengherankan bila dalam beberapa tahun terakhir, bidang keilmuan komunikasi politik di Indonesia mulai melirik kajian pemasaran, khususnya kajian pemasaran politik.



Gambar. 2.1 Skema Pikir Penelitian